



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERKOLANUS RONI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 716368

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m²/120 m² di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 3345 m² di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 3000 m² di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/88 m² di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 258.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 305.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.574.000.000

III. HUTANG Rp. 214.894.423

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.359.105.577

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.